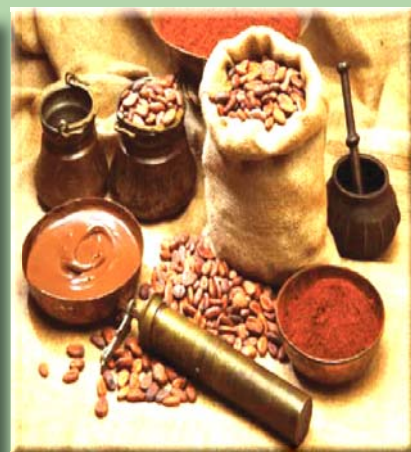


“BUSINESS ENABLING ENVIRONMENT OF COCOA VALUE CHAIN”

MENDORONG PERBAIKAN LINGKUNGAN USAHA PADA RANTAI NILAI KAKAO



KPPOD Membangun Indonesia dari Daerah

KPPOD Membangun Indonesia dari Daerah

Tentang KPPOD

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) berdiri sejak Maret 2001, dengan mandate untuk mengawal pelaksanaan otonomi daerah melalui kegiatan pemantauan secara independen dan obyektif. Dasar kerja-kerja professional KPPOD berpijak pada pemikiran bahwa desentralisasi dan otonomi daerah sebagai kebijakan yang bertujuan mengubah struktur tata kelola pemerintahan sentralisme menjadi terdesentralisasi, sekaligus menggeser pola pembangunan yang didominasi negara kepada kesempatan yang terbuka bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi.

KPPOD menaruh fokus pemantauannya pada aspek-aspek yang terkait kebijakan dan pelayanan publik di bidang ekonomi dan kebijakan desentralisasi/otonomi daerah secara umum. Dengan menggunakan pendekatan multi-perspektif (ekonomi, politik, hukum dan administrasi publik), KPPOD melakukan studi, advokasi, dan asistensi teknis bagi peningkatan mutu tata kelola ekonomi dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis di daerah.



Pembangunan Ekonomi Daerah sebagai fokus utama

Tata kelola ekonomi daerah dan tata kelola keuangan daerah yang baik adalah dua isu utama dalam pembangunan ekonomi daerah yang menjadi fokus utama kegiatan KPPOD. Dua aspek tersebut dijabarkan menjadi empat klaster kegiatan, yakni:

Reformasi Regulasi Usaha: Mendorong deregulasi melalui upaya rasionalisasi jumlah dan/atau jenis perijinan usaha maupun pungutan (pajak/retribusi) di daerah.

Reformasi Birokrasi Perijinan: Mendorong debirokratisasi melalui upaya efisiensi business process (pengurusan) perijinan lewat kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah.

Desentralisasi dan Manajemen Fiskal: Studi dan advokasi kebijakan desentralisasi fiskal yang mendukung kemandirian daerah dan perbaikan kualitas tata kelola keuangan di daerah (APBD) yang pro-pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan publik.

Isu-isu Strategis Otda lainnya: Pemekaran daerah, kerja sama antar-daerah, rencana pembangunan daerah, pemilihan kepala daerah, dsb



Tentang Program “Business Enabling Environment of Cacao Value Chain”

Mendorong Perbaikan Lingkungan Usaha pada Rantai Nilai Kakao

Tahun 2009 Indonesia menjadi produsen kakao terbesar ketiga di dunia. Eksport kakao juga merupakan terbesar ketiga untuk sektor perkebunan (setelah kelapa sawit dan karet). Komoditi kakao merupakan cerminan ekonomi kerakyatan, yang menjadi sumber penghidupan bagi hampir 1,5 juta rumah tangga. Dari luas total lahan 1,6 juta ha, 96% pelaku budi daya kakao dilakukan oleh perkebunan rakyat. Namun sayang, produktivitas kakao semakin menurun karena berbagai persoalan, terutama serangan hama penyakit.

Program “**Pengembangan Iklim Usaha bagi Peningkatan Rantai Nilai Produksi Kakao**” ini dimaksudkan untuk memberi kontribusi bagi penciptaan lingkungan investasi yang kondusif bagi aktivitas usaha kakao. Melalui program ini diharapkan bisa mendukung usaha kakao dalam pengembangan on-farm maupun off-farm, yang melibatkan berbagai aspek rantai nilainya. Program ini sekaligus untuk evaluasi dan masukan atas pelaksanaan program nasional untuk meningkatkan produksi dan kualitas kakao.

Program ini dilaksanakan di **Sulawesi Barat (Sulbar)** dan **Nusa Tenggara Timur (NTT)**, yang masing-masing diwakili oleh satu kabupaten sebagai lokasi program. Kab. Majene di Sulawesi Barat dipilih dengan pertimbangan kontribusi terbesar perekonomian daerah ini bersumber dari sektor pertanian. Selain itu, adanya program nyata pemerintah provinsi bagi pengembangan bisnis kakao sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi dan pendapatan penduduk setempat. Sementara Kab. Sikka di NTT dipilih karena adanya potensi perkembangan usaha kakao ke depannya dan tercatat sebagai daerah penghasil terbesar dari produksi kakao di NTT.

Ada 4 kelompok kegiatan inti dalam program ini: penelitian, diseminasi, advokasi, dan asistensi teknis.

A. PENELITIAN

I. Lingkungan Usaha Rantai Nilai Kakao

Studi lingkungan usaha rantai nilai kakao selain dimaksudkan untuk melihat peta permasalahan pengembangan kakao di daerah lokasi kegiatan, juga untuk mengetahui kebutuhan dan strategi intervensi pengembangan komoditi unggulan daerah ini. Selain itu, studi ini juga sebagai basis untuk menyusun kertas kebijakan dan menyusun manual tentang cara memulai bisnis Kakao di Daerah.

Studi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan database semua peraturan terkait aspek-aspek rantai nilai dari usaha kakao; selanjutnya menganalisis peraturan (desk analysis) tersebut; kajian literatur studi-studi terkait yang pernah ada; riset (wawancara mendalam) dengan para pemangku kepentingan terkait; serta diskusi kelompok fokus (FGD) dengan para pemangku kepentingan terkait di Nasional, Provinsi dan tingkat Kabupaten.





II. Evaluasi Program Nasional Kakao dari Perspektif Pemerintah Provinsi dan Kabupaten

Sebagai respon atas penurunan produksi kakao nasional, Pemerintah melakukan langkah perbaikan melalui program Gerakan Nasional peningkatan produksi dan mutu kakao nasional (Gernas Kakao) yang diimplementasikan sejak 2009. Gerakan ini memberdayakan dan melibatkan seluruh potensi pemangku kepentingan dan sumber daya yang ada.

Guna mengukur keberhasilan program Gernas dan menyusun usulan program perbaikan ke depannya, KPPOD dilakukan evaluasi atas program tersebut. Evaluasi tersebut mencakup evaluasi atas capaian kinerja program, realisasi, dampak dan manfaat yang dihasilkan dari kegiatan gernas dalam peningkatan produktivitas dan pendapatan petani kakao.

B. ADVOKASI

Serangkaian pertemuan dengan dinas sektoral (SKPD) terkait di level Provinsi dan Kabupaten, hingga kepala daerah (Gubernur dan Bupati) dilakukan dalam rangka membahas, mencari solusi dan menjajagi upaya perbaikan kebijakan pengembangan kakao di daerah. Pertemuan ini juga dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan dan komitmen kongkrit dari pihak pengambil kebijakan pengembangan kakao di daerah agar secara langsung dapat diambil tindakan nyata baik berupa program maupun kebijakan.

Selain pertemuan dan diskusi dengan Eksekutif juga dilakukan audiensi dengan DPRD di tingkat Kabupaten guna mendapatkan dukungan politis atas kemungkinan rencana dukungan regulasi bagi pengembangan kakao. Dan untuk membentuk opini public dan menyebarkan hasil-hasil pertemuan dilakukan diskusi public di media masa, baik cetak maupun elektronik. Diskusi dengan media lokal serta dialog radio di ibukota Kabupaten yang dilakukan untuk mendapat dukungan dan masukan dari masyarakat luas.



C. ASISTENSI TEKNIS

Di tingkat teknis, program ini juga dirancang untuk melakukan penguatan kapasitas stakeholders kakao di daerah. Untuk itu serangkaian asistensi teknis dilakukan dalam rangka itu, diantaranya:

1. Pelatihan dan pendampingan pemerintah daerah dalam pengembangan kertas kebijakan dan penyusunan Perda terkait di Kabupaten dalam kerangka metode RIA (regulatory impact assessment).
2. Pendampingan untuk pengembangan "Stakeholder Forum" di Kabupaten yang menjadi lokasi program;
3. Pembuatan manual tentang cara memulai bisnis Kakao di Daerah.



D. DISEMINASI

Dilihat dari lokasi Program "Pengembangan Iklim Usaha bagi Peningkatan Rantai Nilai Produksi Kakao" ini memang hanya mencakup dua provinsi dan masing-masing di satu kabupaten sebagai pilot. Oleh karenanya agar program ini dapat menginspirasi daerah lain dan kemungkinan dapat direplikasikan ke daerah lain dilakukan sejumlah program desiminasi, malui sejumlah seminar dan pertemuan, seperti:

1. Lokakarya Provincial di Kabupaten yang Menjadi Lokasi Program (Kab. Majene-Sulbar dan Kab. Sikka- NTT);
2. Seminar Nasional di Jakarta
3. Publikasi artikel di media massa nasional dan lokal
4. Rangkaian pertemuan dengan para pemangku kepentingan terkait, terutama dengan media massa berpengaruh di tingkat nasional dan lokal
5. Rilis/Konfrensi Pers
6. Publikasi brosur program dan selebaran.





KOMITE PEMANTAUAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Regional Autonomy Watch

Gedung Permata Kuningan, lantai 10
Jl. Kuningan Mulia, Kav.9C
Setiabudi, Jakarta Selatan 12980
Telp: +62 21 8378 0642/53
Fax: +62 21 8378 0643
Website: www.kppod.org
Email: kppod@kppod.org



FORD FOUNDATION

FORD FOUNDATION

Sequis Center, Lt. 11
Jl. Jend. Sudirman 71
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: +62 21 29357200
Fax: +62 21 2935 7210
+62 21 2935 7211
Website: <http://www.fordfoundation.org>
Email: ffjakarta@fordfoundation.org